

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penulisan	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.5.1 Tanggung Jawab International	8
1.5.2 Penentuan Status Pengungsi	12
1.5.3 Perlindungan Terhadap Pengungsi	15
1.6 Metode Penelitian	19
1.6.1 Tipe Penelitian	19
1.6.2 Pendekatan	20
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	21

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	22
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	22
1.7 Sistematika Penulisan	23
BAB II. PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN BAGI PENGUNGSI (REFUGEE) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengungsi	25
2.1.1 Sejarah Pengungsi di Dunia	25
2.1.2 Pengertian Pengungsi	28
2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Oleh Lembaga Internasional	39
2.2.1 <i>International Refugee Organization (IRO)</i>	39
2.2.2 UNHCR Terhadap Penyelesaian Masalah Pengungsi	41
2.2.3 <i>International Organization for Migration (IOM)</i>	52
2.2.4 <i>International Committee of the Red Cross (ICRC)/Palang Merah International</i>	55
2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Menurut Hukum Internasional	58
2.3.1 Perlindungan Pengungsi Berdasarkan Instrumen HAM	59
2.3.2 Perlindungan Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi	67
2.3.3 Perlindungan Pengungsi Berdasarkan <i>Global Compact On Refugee</i>	73
2.4 Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi	76
2.4.1 Prinsip <i>Non-Refoulement</i>	76
2.4.2 Prinsip <i>Non-Discrimination</i>	78
2.4.3 Prinsip <i>Non-Penalization</i>	80

BAB III. TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI DAN NON

PERATIFIKASI KONVENSI JENEWA 1951

3.1 Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional	81
3.2 Tanggung Jawab Negara Berdasarkan Draft ILC 2001 <i>(International Law Commissions)</i>	87
3.3 Tanggung Jawab Negara dan Kaitannya Terhadap Pengungsi	92
3.4 Tanggung Jawab Negara Peratifikasi Konvensi Jenewa 1951	101
3.4.1 Praktek di Jerman	104
3.4.2 Praktek di Australia	111
3.5 Tanggung Jawab Negara Non Peratifikasi Konvensi Jenewa 1951 Terhadap Pengungsi	118
3.5.1 Praktek di Indonesia	121
3.5.2 Praktek di Thailand	131

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	135
4.2 Saran	136

DAFTAR BACAAN